

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Unila.
- Appleby, P.H., 1952, *Mortality and Administration in Democratic Government*. Baton Rouge, Louisiana, Louisiana State University Press.
- Chazawi, Adam, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Djafar, Saidi Muhammad, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Pertama Rajawali Pers, Jakarta.
- Djalil, Rizal, 2014, *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implementasi Pasca Reformasi*. Edisi 1. Jakarta, Semester Rakyat Merdeka.
- H.R., Ridwan. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Henry Campbell Black, M. A., 1968, *Black's Law Dictionary*, Fourth Edition, Minnesota: West Publishing Co.
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jabbara, J.G., and O.P. Dwivedi, 1989, *Public Service Accountability; A Comparatif Perspectif*, United States: Kumarian Press, Inc.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta, Sinar Grafiti
- Kadafi, Binziad, 2023, *Peninjauan Kembali*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo
- Nazir, Moh, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia

- Pane, Musa Darwin, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Logos Publishing.
- Patarai, Idris, 2015, *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*, Makassar: De La Macca.
- Ramli, Samsul dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta, Visimedia Pustaka.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli, Tami, 2012, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang di Indonesia*, Lampung, CV. Utama Anugrah Raharja.
- Saptono, Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum*, Jakarta, Buana Ilmu Populer
- Soekanto, Soerjono *et al*, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Tjandra, Riawan, 2019, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Wibowo, Richo Andi, 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Jakarta, Kencana.
- Ribowo, Richo Andi, 2022, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pendekatan Perbandingan Hukum*, Yogyakarta, UGM Press
- Wiyono, R., 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Mark Bovens, 2006, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework", European Governance Papers, No. C-06-01.
- Dr Muiris MacCarthaigh & Dr Richard Boyle, "Civil Service Accountability: Challenge And Change", Research Paper No. 12, January 2014, Institute of Public Administration
- Kania,Dewi, dkk. 2013. "Tanggung Jawab Rektor sebagai KPA dalam Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri yang Menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PTN PK BLU)", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 3, November 2013
- Gustini Widijaningsih, "Penyelesaian Sengketa Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", Unizar Law Review, Volume 5 Issue 1, Juni 2022.
- Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", Jurnal Administrasi Pemerintahan Vol 2 Issue 1 (2019)
- Edward Omar Sharif Hiariej, "Asas Lex Specialis Systematis Dan Hukum Pidana Pajak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 21 Nomor 1, Maret 2021

Tesis dan Disertasi

- Harmada Junianto Sibuea, 2022, *Analisis Terhadap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Penanganan Keadaan Darurat Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat*, Tesis, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta
- Edwin Bayu Paongan, 2021, *Inkonsistensi Lembaga Peradilan Dalam Memutus Sengketa KTUN Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan PTUN No. 3/G/2019/PTUN.PL dan Putusan PTUN No. 14/G/2019/PTUN.PDG)*, Tesis, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Any Sofiatun, 2021, *Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Masa Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di RSUD Sleman*, Tesis, Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

[Lodewijk Rogier](#), 1992, *Penal Sanctions, Administratif Sanctions and the 'Una via' Principle*, Disertasi, Erasmus University Rotterdam

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63

Putusan

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Perkara Nomor: 10/KPPU-1/2017

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Yyk

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 2/Pid.Sus-TPK/ 2023/ PT YYK

Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI

Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Nomor 01/LHP/XVIII.YOG/01/2018 Atas Belanja Daerah Tahun*

*Anggaran 2017 Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, 17
Januari 2018*

Internet

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Triwulan I Pada Tahun 2021*, diakses melalui <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/3519/Laporan-Kehumasan>
- Eddy O.S Hiariej, “Lex Specialis Dalam Hukum Pidana”, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/06/12/lex-specialis-dalam-hukum-pidana>
- Kompas, “Dicicil, Pengembalian Uang Kelebihan Bayar Pengadaan Mobil Damkar Pemprov DKI”, diakses melalui <https://jakarta.bpk.go.id/dicicil-pengembalian-uang-kelebihan-bayar-pengadaan-mobil-damkar-pemprov-dki/>
- Tim Detiknews, “KPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Stadion Mandala Krida Jogja” , diakses melalui <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6191704/kpk-tetapkan-3-tersangka-korupsi-stadion-mandala-krida-jogja>
- United Nations, 2004, *United Nations Convention Against Corruption*, hlm. 22, diunduh melalui https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf pada tanggal 22 Juli 2023 pukul 18.07 WIB
- Wilda Hayatun Nufus, “Indikasi Kerugian Rp 5,5 M di DPRD Ambon Dibalikin, Jaksa Hentikan Kasus” , <https://news.detik.com/berita/d-5931154/indikasi-kerugian-rp-55-m-di-dprd-ambon-dibalikin-jaksa-hentikan-kasus>
- Yohanes Sogar Simamora, “Uniknya Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Sebagai *Mixed Law*”, diakses melalui <https://fh.unair.ac.id/uniknya-hukum-pengadaan-barang-dan-jasa-sebagai-mixed-law/>